

IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN DI DESA TIRTA KENCANA KABUPATEN BENGKAYANG

Oleh
ROSASIANI
NIM. E01108029

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

Abstrak

Program Beras miskin oleh Pemerintah diperuntukan bagi Rumah Tangga Miskin hingga saat ini masih menimbulkan beberapa permasalahan, diantaranya mengenai pendistribusian yang belum tepat sasaran, belum tepat jumlahnya dan belum tepat waktu sehingga belum maksimal manfaat bagi masyarakat penerima. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif yang menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan secara apa adanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan distribusi Program Raskin di Desa Tirta Kencana. Penelitian dilakukan di Desa Tirta Kencana dengan subyek penelitian petugas Kecamatan Bengkayang khususnya yang menangani Program Raskin, Kepala Desa Tirta Kencana dan masyarakat penerima Program Raskin.

Dari hasil penelitian dilapangan menunjukkan masih banyak dijumpai masyarakat yang tidak tepat sasaran menerima Program Raskin, harga jual yang sampai kemasyarakat masih belum standar dan waktu penerimaan yang tidak tetap. Kurang keakuratan data yang ada tentang penerima raskin juga masih banyak ditemui. Untuk ke depan diharapkan pemerintah dapat memberikan data-data penerima Program Raskin yang akurat sehingga tidak ada data yang ganda. Dan menciptakan suatu program baru untuk membantu masyarakat miskin yang mana masyarakat tidak terlalu bergantung pada bantuan program Pemerintah.

Kata-kata Kunci : Implementasi, Program Raskin, Distribusi

THE IMPLEMENTATION OF “BERAS MISKIN “TIRTA KENCANA VILLAGE BENGKAYANG REGENCY

Abstract

“Beras Miskin “ (Raskin) program is made by the government for poor household, until now is still gave some problems, among others, the industry that has not been right on target, the amounts are not right yet, and times are not right either so that the benefit are not maximum for the receiving communities. This research is descriptive research which describe the phenomena's that happen in the field as it is. Purpose of this research is to describe distribution of “raskin “ Program at Tirta Kencana village. This research do at Tirta kencana village with the subject of the research is Bengkayang District officer especially who handle “Raskin” program, Head of Tirta Kencana village and the recipient of “Raskin “ Program.

The results of field research are shows still many society misses the receiving “Raskin Program “, selling price to the communit is not standard yet, and improper time of receipt. Less accuracy of existing data on the acceptance “Raskin “ is also still prevalent. For the future, the government is expected to provide the data recipient of “raskin” accurate so that no data are double. And create a new program for helping the poor households which are society are not too dependent to government assistance programs.

Keywords : Implementation, Raskin Program, Distribution

A. PENDAHULUAN

Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan dan kerawanan pangan. Masalah ini menjadi perhatian nasional dan penanganannya perlu dilakukan secara terpadu melibatkan berbagai sektor baik di tingkat pusat maupun daerah. Program kebijakan Beras Untuk rumah Tangga Miskin (RASKIN) adalah bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk memberdayakan masyarakat dengan menanggulangi masalah kemiskinan secara terpadu. Upaya-upaya tersebut telah dicantumkan menjadi salah satu program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2008.

Intruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan, menginstruksikan Menteri dan Kepala lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu, Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi Nasional. Secara khusus kepada Perum Bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri. Pemerintah

berupaya mengedepankan peran partisipasi masyarakat dengan mengacu pada teori *Bottom Up*.

Program Raskin (Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin) merupakan metamorphosis dari kebijakan Operasi Pasar Khusus (OPK) yang bertujuan untuk lebih menjelaskan arti Program sehingga diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan di lapangan. Beberapa penyesuaian yang telah dilakukan antara lain meliputi perubahan nama, jumlah beras per rumah tangga, frekuensi distribusi, sumber dan jenis data sasaran penerimaan manfaat, dan penyediaan lembaga pendamping. Adapun penetapan jumlah perbulan per RTM yang pada awalnya 10 kg hingga 20 kg dan pada tahun 2009 sampai sekarang menjadi 15 kg, sedangkan frekuensi distribusi yang pada tahun-tahun sebelumnya berjumlah 12 kali dan pada tahun 2006 ada penurunan menjadi 10 kali dan pada tahun 2007 sampai sekarang kembali menjadi 12 kali per tahun. Sasaran penerima manfaat sebelumnya menggunakan data keluarga prasejahtera (KPS) dan keluarga sejahtera (KS-1) alasan ekonomi. Berdasarkan Pendataan BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) sejak tahun 2006 berubah menggunakan data RTM dari hasil pendataan BPS (Badan Pusat Statistik).

Sasaran dari Program Raskin ini adalah meningkatkan akses pangan kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam rangka menguatkan ketahanan pangan rumah tangga dan mencegah penurunan konsumsi energy dan protein. Program Raskin perlu dilaksanakan agar masyarakat miskin benar-benar bisa merasakan manfaatnya, yakni dapat membeli beras berkualitas baik dengan harga terjangkau. Sebagai Daerah yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk miskin yang masih tergolong tinggi Kabupaten Bengkayang khususnya Di Desa Tirta Kencana termasuk salah satu desa yang menjadi target penyaluran Raskin.

Berdasarkan data yang ada di lapangan dari Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Bengkayang diperoleh data per Juni 2012 bahwa Pagu Raskin Tahun 2012 per Kecamatan / per Desa di Kabupaten Bengkayang total berjumlah untuk RTS-PM berjumlah 10.308 dengan Kuantum / Kg / Bln untuk $5=4 \times 15 \text{ kg} \times 1 \text{ bln}$ berjumlah 154.620 sedangkan Kuantum 7 bulan dengan perhitungan $6=4 \times 15 \text{ kg} \times 7 \text{ bln}$ berjumlah 1.082.340. Adapun keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di Kabupaten antara lain : Sekda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas

Sosial, BPS Kabupaten, Sub Divre Perum Bulog dan lembaga terkait lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Tujuan mulia dari pemerintah untuk memberikan bantuan pada keluarga miskin tidak luput dari penyimpangan-penyimpangan dalam perjalanannya. Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan ada beberapa masalah dalam penyaluran program raskin. (1) tidak tepat sasaran . Seharusnya program Raskin semestinya disalurkan atau dijual kepada keluarga miskin ternyata banyak juga jatuh pada kelompok masyarakat lain (keluarga sejahtera). Hal ini disebabkan oleh *human error*, dimana petugas lapangan justru membagi-bagikan kupon Raskin pada keluarga dekat ataupun kerabatnya, (2) kurangnya koordinasi antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat miskin yang mengakibatkan masyarakat miskin tidak mengetahui keberadaan dan fungsi Raskin dan (3) sering terjadinya kesalahan data jumlah keluarga miskin. Dari data yang ada di lapangan diketahui bahwa jumlah jiwa yang ada di Desa Tirta Kencana berjumlah 3135 jiwa terdiri dari laki-laki 1592 jiwa dan perempuan 1543 jiwa.

Bertitik tolak dari uraian diatas bahwa implementasi kebijakan Program Raskin bagi Rumah Tangga Miskin belum optimal maka dengan itu penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Implementasi Program

Beras Miskin Di Desa Tirta Kencana Kabupaten Bengkayang “.

B. TINJAUAN LITERATUR

1. Kebijakan Publik

Kehidupan manusia membutuhkan berbagai jenis dan macam barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia sejak lahir hingga meninggal dunia tidak terlepas dari kebutuhan akan segala sesuatunya. Untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan diperlukan pengorbanan untuk mendapatkannya. Kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia sehingga dapat mencapai kesejahteraan, sehingga bila ada di antara kebutuhan tersebut yang tidak terpenuhi maka manusia akan merasa tidak sejahtera atau kurang sejahtera. Kebutuhan adalah salah satu aspek psikologis yang menggerakkan makhluk hidup dalam aktivitas-aktivitasnya dan menjadi dasar berusaha.

Berdasarkan dalam UUD 1945 Pasal 33 mengenai kesejahteraan sosial antara lain menyebutkan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran perseorangan. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas usaha kekeluargaan. Kesejahteraan rakyat

berarti kesejahteraan lahir bathin dari rakyat. Secara umum kesejahteraan sering diartikan sebagai kondisi sejahtera, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan.

Adapun tujuan dari peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup (Suharto, 2005) :

- a. Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat.
- b. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung tinggi harga diri dan martabat masyarakat/kemanusiaan
- c. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan/kemasyarakatan.

Sejalan dengan pendapat di atas sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri dan harus dapat berinteraksi dengan orang lain. Di dalam setiap intraksi itu kadang kala membawa masalah. Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan yang mencakup segala

ragam kehidupan bermasyarakat harus dapat mengatasi masalah-masalah yang timbul tersebut yakni dengan lahirnya kebijakan-kebijakan tapi kadang kala dalam perjalanannya kebijakan itu tidak dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang ada.

Menurut Sutopo (2001:1) , munculnya suatu kebijakan didorong karena beberapa hal diantaranya :

- a. Makin meningkatkan masalah-masalah yang dihadapi pemerintah yang menyebabkan para pembuat kebijaksanaan perlu bantuan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut.
- b. Para ahli ilmu-ilmu sosial memulai mengalihkan perhatiannya pada masalah kebijaksanaan yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas suatu kebijakan tidak berarti apa-apa dan tidak menghasilkan apapun apabila kebijakan tersebut tidak diimplementasikan, karena melalui implementasi tersebutlah dapat diketahui apakah kebijakan yang ada dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi atau tidak. Sedangkan menurut Budi Winarno (2002:101) Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai faktor, organisasi dan teknik yang bekerja bersama-sama

untuk menjalankan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Konsep lainnya, seorang ahli Korten (dalam Tangkilisan 2003:7) mengatakan bahwa suatu kebijakan berhasil ditentukan oleh hubungan dari tiga aspek yaitu : jenis kebijakan, penerima kebijakan dan organisasi pelaksana kebijakan, dimana setiap jenis kebijakan memerlukan persyaratan teknis yang berbeda sesuai dengan sifat kebijakan. Oleh karena itu, organisasi pelaksana harus memiliki kompetensi supaya dapat berhasil.

Berdasarkan pada pendapat ahli diatas nampak bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternative atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target grup, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Implementasi kebijakan menurut Charles O Jones (1994:56) merupakan hal yang paling sukar dalam bentuk dan cara memuaskan semua orang yang terlibat di dalamnya sesuai dengan *interest/kepentingan* masing-masing pihak. Sejalan dengan pendapat di atas Jones

menyebutkan tiga kegiatan sebagai pilar-pilar implementasi yakni :

a. Organisasi

Implementasi disalurkan melalui birokrasi sebagai organisasi utama penerapan kebijakan. Dalam implementasi khususnya organisasi pemerintah dalam hal ini untuk Program Raskin yaitu bagaimana pemrakarsa kebijakan atau pembuat kebijakan, bagaimana pejabat-pejabat pelaksana yang ada dilapangan serta aktor-aktor perorangan yang diluar badan-badan pemerintah kepada siapa program itu ditujukan atau kelompok-kelompok sasaran.

b. Interpretasi

Penerjemahan atau penafsiran yang lebih sederhana tentang apa yang harus dilakukan. Bagaimana tim koordinasi raskin yang ada baik dari tingkat pusat , daerah sampai ketingkat yang paling rendah dapat memahami arti penting dari program Raskin dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan Raskin yaitu transparansi, partisipatif dan akuntabilitas.

c. Penerapan

Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran dan lain-lain yang disesuaikan dengan tujuan penerapan merupakan aplikasi dari interpretasi. Dalam hal ini erat kaitannya dengan aturan main yang ada dari program

Raskin yang dibuat oleh pemerintah apakah terlaksana dengan baik sesuai dengan prosedur , seperti harga jual per kg yang ditetapkan per kg Rp. 1.600;

2. Program Raskin

Sesuai dengan tujuan nasional pembangunan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dalam suasana kehidupan berbangsa yang tertib . aman dan dinamis. Pemerintah sebagai pelaku kebijakan publik, perlu sekali memperhatikan tuntutan masyarakat dalam proses politik sesuai dengan asas demokrasi Pancasila. Dengan demikian bukannya hanya hasil yang baik saja yang menjadi jangkauan kebijakan, akan tetapi juga proses kegiatan-kegiatan untuk tercapainya tujuan itu perlu mendapat perhatian dalam mempersiapkannya.

Tujuan dari program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Sasaran Raskin pada tahun 2012 adalah berkurangnya beban pengeluaran RTS berdasarkan data PPLS-11 BPS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 180 kg/RTS/tahun

atau setara dengan 15 Kg?RTS/bulan dengan harga tebus Rp. 1.600 '00/kg netto di TD.

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten terdiri dari : Penanggung Jawab, Ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain , perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi serta pengaduan masyarakat yang ditetapkan dengan SK Bupati. Kegiatan perencanaan yang diatur dalam PEDUM 2012 meliputi penetapan Pagu Raskin dan RTS-PM hingga Desa /Kelurahan. Penetapan Pagu Raskin :

- a. Berdasarkan data RTS hasil PPLS-11 BPS
- b. Pagu Raskin untuk provinsi ditetapkan oleh DEPUTI MENKO KESRA Bidang Koordinasi perlindungan sosial Dan Perumahan Rakyat selaku Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat.
- c. Pagu Raskin untuk Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pagu Raskin Nasional.
- d. Pagu raskin untuk Desa/kelurahan ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan Pagu raskin provinsi.
- e. Pagu Raskin disuatu wilayah yang tidak dapat didistribusikan. Tidak dapat dialihkan ke wilayah lain.
- f. Apabila Pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat diserap s/d 31 Desember 2012 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2013

g. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS hasil PPLS-11 BPS. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Penetapan RTS-PM sebagai berikut :

- a. RTS yang berhak mendapat Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam PPLS-11 BPS, sebagai RTS-PM di Desa/Kelurahan
- b. Rumah Tangga Miskin yang dinilai layak oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta belum terdaftar sebagai RTS-PM hasil PPLS-11 BPS. Maka dapat diberikan Raaskin daerah yang bersumber dari APBD
- c. Perubahan jumlah RTS-PM di setiap Desa/kelurahan tidak diperbolehkan mengubah pagu wilayah setempat.

Adapun mekanisme pelaksanaan Pendistribusian Raskin Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) tahun 2012 sebagai berikut :

- a. Bupati menerbitkan Surat Perintah Alokasi (SPA) kepada Kasub Divre Perum Bulog Berdasarkan Pagu Raskin di masing-masing Kecamatan dan Desa.
- b. Berdasarkan SPA, Kasub divre Perum Bulog menerbit SPPB/DO

- c. Berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di Gudang Perum Bulog dan menyerahkan kepada pelaksana distribusi Raskin di TD.
- d. Apabila terdapat Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas yang ditetapkan dalam Inpres Perberasan, Pelaksanaan distribusi atau Penerima Manfaat dapat mengembalikannya kepada satker Raskin untuk diganti dengan kualitas yang sesuai.
- e. Apabila di TB jumlah RTS melebihi RTS-PM hasil PPLS-11 BPS, maka Kelompok Kerja Raskin tidak diperkenankan untuk membagi Raskin kepada rumah tangga yang tidak terdaftar.
- f. Apabila terdapat alokasi Raskin yang tidak didistribusikan kepada RTS-PM, maka harus dikembalikan ke Perum Bulog untuk dikoreksi administrasi penyalurannya.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang satu

dengan variabel yang lain (dalam Sugiyono,2006:11). Sedangkan menurut Sudarwan (2002:17), penelitian deskriptif dapat pula diartikan sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memotret fenomena individual, situasi atau kelompok tertentu yang terjadi secara kekinian.

Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap mampu memberikan keterangan informasi atau data yang berkaitan dengan penyaluran beras miskin Di Desa Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang , Kabupaten Bengkayang. Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah (1) Petugas /Aparat Kecamatan Bengkayang khususnya yang menangani Program Raskin , (2) Kepala Desa Tirta Kencana dan (4) Masyarakat penerima program raskin .

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi non partisipan, tetapi hanya mengamati dari luarnya saja dengan menggunakan alat bantu berupa catatan lapangan. Dalam penelitian ini yang diamati adalah para penerima manfaat dari program Raskin serta para pengelola Raskin yang ada di Desa Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang. Selain itu juga menggunakan teknik

wawancara mendalam, yaitu melakukan Tanya jawab secara langsung dan mendalam kepada subyek penelitian guna pengumpulan data primer dan sekunder dengan mengacu pada suatu daftar pertanyaan (panduan wawancara) yang sudah dipersiapkan sebelumnya agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Peneliti juga menggunakan studi dokumentasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen pemerintah yang erat hubungannya dengan materi penelitian, buku-buku literatur, makalah, majalah serta dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Program Raskin dengan menggunakan alat berupa foto copy dalam rangka menggandakan angka-angka dan data-data. Sedangkan teknik analisa data pada penelitian ini dalam menganalisa data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

D. PEMBAHASAN

Desa Tirta Kencana adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan roda empat dari ibukota Kabupaten Bengkayang. Adapun jarak tempuh dari ibukota kecamatan \pm 5 km

dengan waktu tempuh 20 menit. Desa Tirta Kencana berdasarkan data yang ada di Kantor Kecamatan Bengkayang secara geografis batas wilayah Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Betung dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Landak, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bhakti Mulya dan bagian Barat dengan Kecamatan Sungai Betung. Desa Tirta Kencana memiliki tiga dusun terdiri dari (1) Dusun Lamat Panjang, (2) Dusun Lara Gunung dan (3) Dusun Tiga Desa .

Berdasarkan dari data yang ada diketahui untuk rumah tangga sasar di Kecamatan Bengkayang tercatat berjumlah 1.032 kepala keluarga . Jumlah rumah tangga miskin jika dilihat per desa yang ada di desa Tirta Kencana berjumlah 145 rumah tangga miskin. Dari data yang ada diketahui bahwa rumah tangga sasaran atau rumah tangga miskin yang ada di desa Tirta Kencana tercatat sebanyak 145 RTM. Berdasarkan data PPLS-2008 tercatat pada periode Januari sampai dengan Mei 2012 penerima program sebanyak 156 KK, dan pada periode Juni sampai dengan Desember dan sampai penulis melaksanakan penelitian ini data yang digunakan berdasarkan data PPLS-11 penerima program raskin sebanyak 101 KK.

Kebijakan Beras untuk Rumah Tangga Miskin adalah bagian dari upaya

Pemerintah Indonesia untuk memberdayakan masyarakat dengan menanggulangi masalah kemiskinan secara terpadu. Program Raskin adalah sebuah program dari pemerintah dalam upaya untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai sebuah bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial kepada rumah tangga miskin melalui distribusi beras murah.

Kecamatan Bengkayang berdasarkan data PPLS tahun 2008 tercatat sebanyak 900 RTS-PM untuk kuantum 5 (lima) bulan periode Januari sampai dengan Mei 2012. Dan untuk kuantum 7 bulan berikutnya periode Juni sampai dengan Desember 2012 berdasarkan data PPLS 2011 tercatat sebanyak 644 RTS-PM. Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Berdasarkan data PPLS-11 BPS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 180 kg/RTS/tahun, atau setara dengan 15 kg/RTS/bulan dengan harga tebus ditingkat distribusi Rp. 1.600/kg.

Data PPLS-08 tercatat sebanyak 900 RTS-PM yang tersebar dari 6 (enam) Kelurahan/Desa yang ada di Kecamatan Bengkayang.

Berdasarkan data-data di atas ada perbedaan dalam jumlah RTS-PM masing-masing kelurahan/desa. Pagu Raskin untuk Periode Januari sampai dengan Mei 2012 data yang digunakan berdasarkan data PPLS-08, sedangkan pagu raskin untuk Juni sampai dengan Desember 2012 data yang digunakan berdasarkan data PPLS-11. Sejalan dengan Surat Deputi MenkoKesra Bidang Perlindungan Sosial dan perumahan Rakyat No. B216/KMK/DEP.II/II/2008 Tanggal 5 Pebruari 2008 perihal pagu Raskin menyatakan bahwa pendistribusian beras bersubsidi dengan ketentuan setiap KTM memperoleh 15 kg selama 10 bulan dengan harga Rp.1.600/kg netto di titik distribusi.

Dalam pelaksanaan kebijakan program raskin tidak selalu berpedoman pada prosedur kebijakan karena masih tidak sesuai dengan realisasi pembagian beras Raskin kepada masyarakat penerima Raskin. Dari data yang ada dilapangan dan hasil observasi dilapangan diketahui bahwa masyarakat penerima beras Raskin yang ada di Desa Tirta Kencana khususnya, warga tidak menerima 15 kg sesuai ketentuan tetapi lebih banyak kurang dari 15 kg. Dari data kecamatan diketahui bahwa untuk Desa Tirta Kencana mendapatkan pembagian Raskin 1 ton untuk dibagikan kepada RTS-PM sesuai pagu yang ditentukan.

Seperti halnya pagu Raskin berdasarkan data PPLS 08 untuk periode Januari sampai dengan Mei 2012 tercatat untuk Desa Tirta Kencana 156 KK RTS-PM penerima Raskin. Dengan jatah 1 ton beras Raskin yang diberikan untuk dibagikan kepada 156 KK, maka masyarakat penerima raskin tidak mendapatkan 15 kg dari yang ditentukan. Masyarakat hanya mendapat beras Raskin berkisar 7 kg sampai dengan 10 kg/KK. Dengan biaya yang lebih besar dari ketentuan yang telah ditetapkan. Dari hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa harga jual beras Raskin beraneka ragam . harga dititik distribusi desa masyarakat penerima raskin membayar Rp.2.800/per kg sampai dengan Rp. 3.000/per kg.

Dari data PPLS-11 RTS-PM untuk desa Tirta Kencana tercatat 101 KK penerima beras Raskin. Dengan jumlah 101 KK penerima beras raskin, sesuai jatah yang diberikan 1 ton beras raskin untuk desa ini maka masyarakat penerima beras raskin hanya menerima sekitar 10 kg/KK dengan harga jual di titik distribusi berkisar Rp. 2.800/kg sampai dengan Rp. 3.000/kg. Perbedaan harga ini diakibatkan karena biaya tambahan seperti biaya angkut untuk transportasi.

Efektivitas program Raskin akan dapat dicapai melalui koordinasi antar instansi/lembaga yang terkait di tingkat pusat maupun daerah. Mengingat survei

yang dilakukan untuk penentuan rumah tangga miskin dilakukan 3 tahun sekali oleh BPS, sehingga membuat kewalahan pelaksana tingkat bawah dalam penanganan masyarakat yang menerima manfaat. Dari hasil wawancara dan penelitian dilapangan bahwa musyawarah kelurahan tidak dilakukan disemua kelurahan, walaupun ada kurang optimal dan kurang melibatkan masyarakat dan umumnya tidak bertujuan untuk mempetajam sasaran. Dimana kondisi tersebut sejalan dengan temuan lapangan yang menunjukkan bahwa musyawarah kelurahan hanya dilakukan untuk menyepakati pembagian beras raskin secara merata kepada seluruh rumah tangga. Dari data yang ada dilapangan dan wawancara diperoleh informasi bahwa masih ada masyarakat miskin yang seharusnya mendapat bantuan program Raskin tapi tidak menerima sebaliknya masyarakat yang tidak masuk dalam daftar penerima program beras Raskin mendapatkan beras Raskin. Dengan demikian masih ada ditemukan penerima yang tidak tepat sasaran. Seperti halnya salah satu penerima beras Raskin mengatakan, bahwa pada saat beras raskin keluar untuk diambil dan bersamaan pada saat itu beliau tidak mempunyai uang dan ditunda pengambilannya. Seminggu kemudian mendatangi tempat distribusi

beras di desanya yang terjadi adalah petugas mengatakan beras sudah habis.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tingkat bawah selalu mengambil keputusan yang dapat merugikan masyarakat miskin. Seperti diketahui bahwa tujuan dari program ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat miskin terutama beras. Dilema seperti ini sering terjadi bagi masyarakat yang benar-benar kurang mampu. Berdasarkan informasi yang di dapat dilapangan diketahui bahwa beras Raskin yang terlambat pengambilannya di jual kepada masyarakat yang bukan termasuk penerima Raskin dengan harga jual berkisar Rp. 3.000/kg sampai dengan Rp 4.000/kg.

Penyimpangan kebijakan juga terjadi seperti mundurnya waktu pelunasan Hasil Penjualan Beras (HPB) yang biasanya dipergunakan oleh aparat yang tidak langsung diserahkan kepada Bank. Dan dilihat dari segi kualitas beras yang diberikan masih sering ditemukan ketidaksesuaian seperti kualitas beras yang buruk, beras yang tidak bersih dan berkutu, beras patah-patah, dan kadang timbangan beras yang kurang dikarenakan terjadi perbedaan penggunaan alat ukur dan timbangan yang tidak benar.

Dari tinjauan dokumen dan data yang ada dilapangan diketahui bahwa alokasi beras untuk setiap rumah tangga

mengalami beberapa kali perubahan. Pada saat ditetapkan 15 Kg/KK maka jumlah beras yang diterima oleh rumah tangga penerima bervariasi berkisar antara 8 sampai 10 kg/liter. Dari analisa data yang ada menunjukkan bahwa beras Raskin dibagikan kepada penerima manfaat yang jumlahnya lebih banyak dari pada jumlah sasaran, sehingga dengan demikian jumlah beras yang diterima per rumah tangga lebih rendah dari yang telah ditentukan atau ditetapkan 15 Kg. Dapat diperhitungkan bahwasanya dari data PPLS-11 sebanyak 101 KK penerima raskin lebih kurang sekitar 15% adalah penerima tidak tepat sasaran.

Jika dilihat dalam Juklak Juknis, Program Raskin menyediakan Sekretariat pengaduan masyarakat yang diberi nama Unit Pengaduan Masyarakat (UPM). Namun kenyataan yang ada dilapangan bahwa keberadaan Sekretariat tersebut tidaklah disosialisasikan kepada masyarakat secara menyeluruh sehingga masyarakat tidak mengetahui kemana mereka harus mengadu.

Dengan demikian keberadaan Sekretariat Pengaduan tidak diketahui secara luas oleh masyarakat khususnya masyarakat Desa Tirta Kencana sehingga fungsinya tidak efektif . Selama ini biasanya masyarakat hanya menyampaikan keluhan kepada aparat desa atau petugas pembagi beras raskin selama ini

masyarakat merasakan sebagian besar keluhan yang disampaikan tidak ditindaklanjuti.

Masalah kemiskinan menjadi pembicara banyak pihak, karena kemiskinan merupakan permasalahan yang multidimensi dan menjad tanggung jawab semua pihak. Kemiskinan harus dicari penyelesaiannya melalui akar permasalahan dari kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di negara-negara yang sedang berkembang. Masalah kemiskinan merupakan suatu problema karena masalah kemiskinan menuntut adanya upaya pemecahan masalah secara berencana, terintegrasi dan menyeluruh dalam waktu yang singkat.

Berdasarkan uraian di atas bahwa keberhasilan program dapat dilihat dari bagaimana penyelenggaraan pemerintahan mengefektifkan sumber-sumber daya yang ada sehingga pelaksanaan program dapat dirasakan masyarakat penerima manfaat. Kebijakan Program Raskin yang digulirkan oleh Pemerintah jika melihat pada kondisi yang ada di Desa Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang di Kabupaten Bengkayang sampai saat ini masih belum berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Untuk dapat meningkatkan pelayanan Program Raskin dapat berjalan

dengan baik maka sangat diperlukan optimalisasi kebijakan Rogram Raskin .

Perananan komunikasi dalam suatu pelaksanaan kebijakan sangat penting sekali. Dengan adanya komunikasi maka akan tercipta kesamaan persepsi dan pandangan dari para pelaksana tentang arti dan tujuan dari sasaran kebijakan yang telah ditetapkan. Komunikasi dapat dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang Program Raskin. Sosialisasi kebijakan Program Raskin keberhasilan pelaksanaan kebijakan beras miskin yang dapat dilakukan berbagai cara yang paling efektif dan memungkinkan masyarakat umum dan masyarakat miskin mengetahui secara benar mekanisme, hak-hak dan kewajibannya. Selain dari pada itu masyarakat dapat mengetahui kemana dan bagaimana cara melapor atau mengadu apabila ditemukan ada indikasi penyimpangan dalam pendistribusian beras raskin.

Pada dasarnya informasi yang disampaikan oleh komunikator sudah cukup jelas tetapi kembali kepada pendidikan masyarakat yang masih rendah di kelurahan/desa penerima program Raskin sehingga terjadi salah pengertian . Disisi lain kadang kala pesan atau informasi yang disampaikan tidak konsisten dan kadang tidak sampai kepada masyarakat penerima manfaat. Kondisi yang ada di Desa Tirta Kencana informasi

yang disampaikan cukup luas tapi tidak merata sampai kepada penerima manfaat, disamping itu tingkat pendidikan masyarakatnya masih rendah.

Dalam pelaksanaan program Raskin sumber daya manusia terutama aparat pelaksanaan harus dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Di satu sisi para aparat pelaksana kebijakan Raskin sudah memiliki kualifikasi yang cukup baik tapi program Raskin memerlukan waktu yang cukup lama dan tidak menutup kemungkinan menimbulkan kejenuhan bagi aparat pelaksana Raskin. Disamping itu tingkat kompetensi yang dimiliki aparat pelaksana di desa masih kurang terutama di Desa Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, kurangnya pagu raskin berimplikasi pada munculnya berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program seperti ketepatan jumlah beras, dan penerima manfaat. Kurangnya pagu raskin dirasakan kurang akuratnya data BPS, yakni masih ditemukan terdapat rumah tangga miskin yang tidak terdaftar dan sebaliknya masih ditemukan adanya rumah tangga tidak miskin juga terdaftar sebagai penerima manfaat. Problema seperti ini sudah saatnya instansi-instansi pemerintah yang terkait dengan program raskin untuk memperbaiki sistem pendistribusian dan pendataan yang akurat .

E. KESIMPULAN

Dari penelitian di Desa Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, bahwa dalam pelaksanaan program Raskin yang mana tujuan dari program ini adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Terdapat permasalahan yang dihadapi dari penelitian di lapangan yaitu seperti (1) Data yang dipergunakan sebagai pedoman penentu masyarakat penerima manfaat selalu tidak tetap sesuai pagu yang ditetapkan sehingga berdampak pada berkurangnya jumlah beras yang diterima, (2) ketidak tepatan sasaran yang ada dilapangan disebabkan karena ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menjual beras Raskin kepada bukan masyarakat penerima program raskin, (3) minimnya sumber daya manusia yang dimiliki, (4) kurangnya koordinasi dan kerjasama maupun pengawasan sampai tingkat bawah mengakibatkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dilapangan.

Terkait dengan permasalahan – permasalahan yang dihadapi di Desa Tirta Kencana dalam pelaksanaan program Raskin dalam hal ini ketidak tepat sasaran penerima manfaat, pagu beras yang disediakan kurang, sosialisasi dan

transparansi harga yang dikenakan kepada penerima manfaat serta pendistribusian yang selalu terlambat. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut perlu langkah-langkah untuk dapat mengoptimalkan program raskin yang ada seperti (1) Sosialisasi Peraturan Perundangan Kebijakan Program Raskin, (2) Validasi Penerima Raskin, (2) Sanksi Penyimpangan Kebijakan Raskin

Disamping kebijakan-kebijakan yang diambil pengelola tingkat bawah dalam hal pelaksanaan program Raskin dan ditemukannya permasalahan-permasalahan yang ada dilapangan, bahwa sejauh ini dari penelitian penulis berdasarkan data-data yang ada dan hasil observasi dan wawancara di ketahui bahwa program Raskin yang ada di Desa Tirta Kencana masih belum optimal dan memuaskan masyarakat penerima manfaat terkait tujuan dari program tersebut.

F. SARAN

Beranjak dari kesimpulan di atas dan berbagai permasalahan yang ada dilapangan, maka peneliti memberikan beberapa masukan ataupun saran antara lain :

1. Perlu adanya sosialisasi secara berkala kepada penerima manfaat sampai

ketingkat bawah setiap ada kebijakan baru terhadap program Raskin

2. Pagu jumlah rumah tangga penerima harus ditetapkan secara tegas dan sesuai dengan jumlah kelompok sasaran rumah tangga. Katagori rumah tangga sasaran harus didefinisikan secara jelas, apakah hanya dibatasi untuk kelompok sangat miskin atau memasukkan kelompok miskin juga serta menjangkau kelompok hampir miskin saja.
3. Perlu adanya papan informasi kepada penerima manfaat terkait orang-orang yang berhak mendapatkan program.
4. Perlu adanya transparansi informasi kepada masyarakat dalam pengambilan kebijakan.
5. Data penerima manfaat dapat diperbaharui secara berkala minimal 1 kali setahun.

G. REFERENSI

- Dunn, William, N, 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajahmada Universitas Press.
- Jones, Charles O, 1994. *Pengantar Kebijakan Publik*. Bandung; Alfabet
- Kusumanegara, Solahuddin, 2010. *Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Moleong, Lexy, J, 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Noor, Arifin, 2007. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Nugroho, Riant, 2009, *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Putra, Fadillah, 2001, *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Offset

Subarsono, AG, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono, 2000, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabet

Tangkilisan, Hassel nogi S, 2003, *Evaluasi Kebijakan Publik Penjelasan, Analisis Dan Transformasi Pikiran Nagel*. Yogyakarta: Balairung & Co.

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, *Program Raskin*. Diambil pada tanggal 21 Agustus 2013 dari <http://www.menkokesra.go.id/pdf/deputi2/raskin/pedomanumraskinawpedoma.pdf>

Sosialisasi penyaluran raskin, diambil pada tanggal 10 November 2013 dari <Http://www.maroskab.go.id/berita-559>.



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurmafis.untan.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Rosasiani
NIM / Periode lulus : E01108029 / 2015
Tanggal Lulus : 30 - April - 2015
Fakultas/ Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / IAN
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara / IAN
E-mail address/ HP : 081256075342

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Implementasi Program Beras Miskin di Desa Tirta Kencana
Kab. Bengkayang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltex*
- content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal : Publika.....

Dr. Pardi M.A.B
NIP. 1972 09 05 2002121003

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 25-05-2016

Rosasiani
NIM. E01108029

Catatan :
*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)